



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 830/VIII/2014

IV/AGUSTUS 2014



## **Parlemen Modern Harus Mampu Pecahkan Masalah Korupsi**

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT AGUSTUS 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu keempat bulan Agustus 2014 diisi Pidato Presiden RI pada penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN TA 2015 beserta nota keuangannya, Pidato Ketua DPR RI pada rapat paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan I TS 2014 serta Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I TS 2014.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Pidato Presiden terkait RAPBN TA 2015

Di depan rapat paripurna DPR RI, Presiden menyampaikan bahwa nota keuangan RAPBN tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan bahwa nota keuangan dan RAPBN 2015 disusun oleh pemerintahan 2009-2014 dan dilaksanakan oleh pemerintah baru hasil Pemilu tahun 2014. Karenanya, penyusunan anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2015 masih bersifat baseline, dimana substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga mengatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini, pembangunan di tanah air mengalami kemajuan yang menggembirakan. Tahun 2004, total belanja negara adalah sebesar Rp.427,2 triliun dan di tahun 2014 angka tersebut menjadi Rp. 1.876,9 triliun. Dengan demikian, belanja negara meningkat sekitar empat kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Dalam waktu sepuluh tahun terakhir, anggaran kesehatan meningkat sekitar delapan kali lipat, dari Rp. 8,1 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 67,9 triliun di tahun 2014. Sedangkan pada kurun waktu yang sama, anggaran pendidikan meningkat enam kali lipat dari Rp. 62,7 triliun menjadi Rp. 375,4 triliun, untuk infrastruktur meningkat hampir 11 kali lipat dari Rp. 18,7 triliun menjadi Rp. 206,6 triliun dan anggaran ketahanan pangan meningkat hampir tujuh kali lipat dari Rp. 10,7 triliun menjadi Rp. 72,4 triliun. Tahun 2014, Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan metode perhitungan *Purchasing Power Parity*. Tentu, hal



ini adalah sesuatu yang membanggakan karena menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sudah di jalur yang benar.

Dalam uraian rinci pokok-pokok kebijakan dan rencana pada sisi belanja negara, Presiden menyampaikan bahwa pada RAPBN tahun 2015, direncanakan ada tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar di atas Rp. 40 triliun. Ketujuh Kementerian Negara dan Lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan. Alokasi anggaran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 67,2 triliun, sedangkan untuk Kementerian Agama Rp. 50,5 triliun, yang mana akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan. Dalam upaya peningkatan pemerataan pendidikan, pada tahun 2015 penyediaan bantuan siswa miskin dan beasiswa bagi mahasiswa miskin (Bidikmisi) akan ditingkatkan. Pada Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran adalah Rp. 47,4 triliun yang akan diprioritaskan bagi peningkatan akses dan kualitas kesehatan, seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Pada bidang pertahanan, alokasinya adalah sebesar Rp. 95,0 triliun. Digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan, meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya.



Sedangkan alokasi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 47,2 triliun, dan untuk dua Kementerian yang paling berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (sebesar Rp. 74,2 triliun) dan Kementerian Perhubungan (sebesar Rp. 44,6 triliun). Pada tahun 2015 pula, direncanakan akan dibangun lima Bandar udara baru dan mengembangkan serta merehabilitasi 51 bandar udara melalui Kementerian Perhubungan. Dalam pidatonya, Presiden juga mengemukakan bahwa anggaran belanja non Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 779,3 triliun, yang dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang. Anggaran belanja subsidi adalah sebesar Rp. 433,5 triliun, yang mana untuk subsidi energi sebesar Rp. 36,5 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp. 70,0 triliun.

Dengan uraian RAPBN 2015 yang dikemukakan oleh Presiden, maka secara garis besar postur RAPBN 2015 adalah sebagai berikut: total pendapatan negara mencapai sebesar Rp. 1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.370,8 triliun, PNB sebesar Rp. 388,0 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp. 3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp. 2.019,9 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 640,0 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp. 357,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBN 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Ketika menutup pidato RAPBN 2015, Presiden juga mengumumkan bahwa berdasarkan UU Nomer 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pemerintah bersama Bank Indonesia mengumumkan bahwa Rupiah Kertas NKRI dengan pecahan Rp. 100.000 tahun emisi 2014 dinyatakan mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan di seluruh Indonesia. Presiden menyatakan hal ini adalah sebuah penegasan bahwa Rupiah sebagai mata uang NKRI merupakan salah satu symbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

### Pidato Ketua DPR di Rapat Paripurna

Ketua DPR RI dalam pidatonya menyampaikan bahwa RAPBN 2015 memiliki makna khusus. Selain merupakan APBN transisi yang hanya membuat baseline dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru nantinya untuk melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan visi dan misinya. Juga, merupakan APBN pertama pasca putusan MK yang mengabulkan pembatalan kewenangan DPR dalam membahas RAPBN sampai dengan rincian kegiatan dan jenis belanja. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan program pembangunan. APBN bukan merupakan hasil akhir dan tujuan akhir, akan tetapi sebuah rencana yang dalam realisasinya perlu terus mendapat perhatian, monitoring dan pengawasan terutama dari DPR RI dan DPD RI, untuk memastikan bahwa arah, tujuan, prioritas dan target pembangunan serta alokasi anggaran Pusat dan Daerah tepat guna, tidak menyimpang dan dimanfaatkan untuk sebesar-

besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewan melihat bahwa politik anggaran harus tetap bersandar pada tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk kemakmuran rakyat banyak.

DPR RI periode 2009-2014 akan segera mengakhiri masa tugasnya. Untuk itu, Dewan akan segera membahas secara intensif anggaran 2015, dengan tetap dalam ketelitian dan kecermatan, termasuk juga mempertimbangkan masukan-masukan dari DPD RI. Selain tentang anggaran, terkait pelaksanaan fungsi legislasi, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa capaian legislasi memang masih sangat rendah. Ada 68 RUU yang masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2014. DPR sebenarnya telah membuat beberapa terobosan untuk meningkatkan kerja legislasi, misalnya sejak tahun 2010 DPR memberlakukan hari legislasi. Dua hari dalam satu pekan, ditetapkan sebagai hari khusus untuk membahas RUU. Sejumlah kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target legislasi antara lain belum optimalnya kinerja anggota Dewan dan Pemerintah dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU.

Pada DPR RI periode 2009-2014 juga telah diusahakan penguatan kelembagaan, baik yang berkaitan dengan kedewanan maupun Sekretariat Jenderal sebagai lembaga pendukung. DPR RI telah menetapkan Renstra 2010-2014 sebagai pedoman kerja kelembagaan yang memuat langkah-langkah strategis dan program rinci untuk membangun lembaga DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang amanah, kredibel dan demokratis. Pada bidang luar negeri, dalam rangka kepemimpinan DPR RI di forum SEAPAC (*Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption*), DPR akan menyelenggarakan Board of Meeting dan SEAPAC Workshop dengan tema *Stronger Ethics and Integrity: Path for Parliament to Combat Corruption* di Jakarta pada tanggal 28-29 Agustus 2014. DPR RI juga akan berperan aktif di forum parlemen regional dengan menghadiri Sidang Umum ke-35 AIPA yang akan diselenggarakan di Vientiane, Laos pada tanggal 14-20 September 2014. Sidang tersebut mengusung tema "*Strengthening Parliamentary Cooperation in the ASEAN Community Building*" dan membahas isu-isu dibidang politik, ekonomi, sosial, organisasi dan *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) serta topik-topik dialog dengan negara peninjau.

### Rapat Paripurna Masa Sidang I TS 2014

Salah satu agenda rapat pada sidang paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2014 tersebut adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. RUU ini sangat penting mengingat Indonesia segera menghadapi pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Saat itu, produk asing dengan mudah masuk ke Indonesia. UU ini diharapkan dapat menjadi semacam filter bagi serbuan produk asing ke Indonesia. Hal ini selain untuk melindungi konsumen di Indonesia juga untuk melindungi produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro-kecil-menengah, sehingga diharapkan dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian akan terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan standardisasi

dan penilaian kesesuaian secara efisien, efektif, terpadu, dan terorganisasikan dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk nasional serta peningkatan perekonomian nasional. Standardisasi sendiri mempunyai arti sebagai proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sedangkan penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomer 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional belum memadai untuk mengatur standardisasi dan penilaian kesesuaian. Peraturan tersebut belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang telah berkembang dengan pesat. Karenanya, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu diatur dalam UU yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu serta terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing dan perekonomian nasional.\*\*\*

## Parlemen Modern Harus Mampu Pecahkan Masalah Korupsi

Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengatakan, dalam dunia modern saat ini, peran parlemen tidak hanya terbatas pada fungsi tradisional dalam menyusun UU, anggaran dan pengawasan.

“Parlemen yang modern harus memiliki kemampuan untuk ikut dalam pemecahan masalah. Adalah penting diakui bahwa tanggung jawab dalam pencegahan dan memerangi korupsi merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat,” ujar Surahman saat membacakan *Welcome Remarks*, saat sesi pembukaan SEAPAC Boar Meeting dan Workshop, di Jakarta, Kamis, (28/8).

Menurutnya, kerjasama antar parlemen menawarkan sebuah solusi dalam mengidentifikasi kekurangan pada system pemerintahan kita sendiri. “Hal tersebut juga menawarkan sebuah strategi alternatif bagi parlemen untuk menjadi lebih konstruktif dalam menyusun resolusi. Terkait dengan perang melawan korupsi. Komitmen kita di SEAPAC akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tanggung jawab parlemen,” tandasnya.

Saat ini, lanjutnya, SEAPAC tengah berusaha untuk memperluas keanggotaan dengan mendukung pembentukan GOPAC National Chapter di Negara-negara anggota ASEAN



Ketua BKSAP Surahman Hidayat

lainnya termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Singapura.

Pada awal pidatonya, Surahman menegaskan, Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi, dan hal ini merupakan masalah global. “Bagi Negara-negara berkembang, korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit Kanker, yang mengacaukan distribusi pembangunan. Korupsi juga meruntuhkan nilai-nilai demokrasi dan melanggar ajaran agama. Korupsi dalam

berbagai bentuk adalah melawan hukum dan dianggap tidak hanya sebuah kejahatan namun juga sebuah dosa yang dikutuk oleh semua agama,” terangnya.

Dia menambahkan, korupsi menyakiti segenap elemen masyarakat, menciptakan kemiskinan dengan menyebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar yang seimbang. Korupsi menyebabkan keterbelakangan. “Tanpa korupsi kita telah dapat mencapai banyak hal, seperti akses terhadap air bersih, pen-

didikan yang bermutu, fasilitas sanitasi yang baik, perumahan yang sehat, fasilitas perawatan kesehatan, dan akses terhadap makanan yang bergizi untuk semua masyarakat,” jelasnya.

Menurut Surahman, Pemerintahan yang demokratis akan mendorong transparansi dan keterbukaan informasi serta akuntabilitas segenap pejabat publik. Karena itu, Parlemen merupakan simbol dari demokrasi dan korupsi meruntuhkan demokrasi.

“Oleh karena itu, kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik selain menunjukkan kepedulian terhadap merajalelanya korupsi yang merupakan sebuah ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional, oleh karenanya penguatan etika dan perilaku parlemen adalah hal yang sangat penting dalam memerangi korupsi,” jelasnya.

Keabsahan dari parlemen, lanjutnya, dapat diukur dari efektivitas dan kinerja dari peran yang dilaksanakan

oleh Parlemen. “Parlemen yang kuat dan bertanggung jawab dapat dicirikan sebagai adil, menegakkan aturan hukum dan mewakili masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Parlemen yang korup adalah entity yang dipandang remeh dan tidak akan dapat melaksanakan kekuasaannya dalam mengawasi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. (si) foto: [odjie/parole/iw.](#)

## Penguatan Etika dan Integritas Cegah Korupsi

Wakil Ketua DPR M.Sohibul Iman mengatakan, penguatan etika dan integritas para anggota parlemen harus mendapatkan prioritas utama dalam rangkaian kerja bersama kita dalam isu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Tegaknya etika dan integritas paripurna yang diyakini oleh para anggota parlemen SEAPAC akan mendorong terbentuknya lingkungan parlemen dan kawasan di Asia Tenggara yang transparan, akuntabel, dan berwibawa,” ujarnya saat membuka Workshop mengenai *The Stronger Ethics and Integrity : Path for Parliament to Combat Corruption*, di Jakarta, Kamis, (28/8).

Menurutnya, sistem administrasi pemerintahan yang kondusif bagi terwujudnya lingkungan yang bebas dari korupsi di berbagai sektor pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting, namun memiliki keteguhan etika dan integritas paripurna.

“Dalam hal ini jauh lebih esensial dan mendasar sesungguhnya tindak pidana korupsi tidak mungkin dicegah hanya oleh rangkaian pagar hukum yang sedemikian kompleks tapi harus disertai etika dan integritas yang paripurna dari para penyelenggara Negara,” paparnya.

Dia menambahkan, korupsi di kawasan Asia Tenggara masih tergolong serius. Hal ini tergambarkan dalam skor nilai yang diraih oleh Negara-negara ASEAN dalam indeks persepsi korupsi (IPK) *Transparency International* (TI) pada tahun 2013 yang lalu.

“Tentunya ini merupakan tantangan besar, utamanya bagi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berada pada level bawah dari peringkat bebas korupsi. Karenanya, kita perlu saling bertukar pengalaman, pengetahuan dan best practices dari Negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara yang telah mencapai kesuksesan dalam pemberantasan Korupsi,” tandasnya.



Wakil Ketua DPR Sohibil Iman

Dia mengatakan, secara umum pemberantasan korupsi akan efektif melalui dua jalur yaitu legal formal dan moral etika. Benteng utama adalah kesadaran moral etika karena dia akan mencegah kita dari niat dan perilaku koruptif. Bagi mereka yang lemah kesadaran etika dan moral maka hukum harus diterapkan sekeras-kerasnya sehingga menimbulkan efek jera.

“Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menjalankan langkah yang sangat progresif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 2004-2012 saja, Presiden Yudhoyono telah menandatangani 176 Izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat Negara yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa sedikitpun melihat latar belakang jabatan, partai politik dan koneksi pelaku korupsi tersebut,” paparnya.

Langkah progresif lainnya, lanjut Sohibil, adalah pembentukan satgas pemberantasan mafia hukum, ratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 tahun 2006 serta adopsi strategi nasional pemberantasan korupsi melalui peraturan presiden nomor. 55 tahun 2012. (si) foto: [iwan armanias/parole.](#)

# Pemberantasan Korupsi Harus Libatkan Peran Masyarakat

Ketua *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) Indonesia Pramono Anung mengatakan, Pemberantasan Korupsi tergantung dari legislasi maupun peran partisipasi masyarakat. “Indonesia sudah memiliki tool yang cukup dalam memberantas korupsi yang kurang hanya *asset recovery* saja,” ujar Pramono saat Konferensi Pers sesuai *Workshop mengenai the stronger ethics and integrity: Path for Parliament to combat corruption*, di Jakarta, Kamis sore, (28/8).

Melihat langkah ini, ujarnya, diharapkan masa depan pemberantasan korupsi semakin baik. Kita ketahui bahwa masih ada anggaran yang *idle* yaitu anggaran diajukan tetapi tidak dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat. “Perlu juga dipikirkan pola cara pandang anggaran yang lebih efisien sehingga ekonomi kita dapat lebih baik lagi,” tandasnya.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Pimpinan dan Anggota BKSAP saat jumpa Pers

Menurut Pramono, gerakan anti korupsi tidak dapat berjalan apabila media massa tidak melakukan pengawasan yang ketat. “Di dalam negara demokrasi, media massa menjadi pilar keempat jadi siapapun yang melakukan korupsi itu ada budaya malu,” tuturnya.

Pertemuan *Board Meeting the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) dan *Workshop mengenai “The Stronger Ethics and Integrity: Path*

*for Parliament to Combat Corruption”* merupakan tidak lanjut dari event Sidang Umum SEAPAC yang berlangsung di Medan-Sumut pada tanggal 23-24 Oktober 2013 yang lalu, dan diantaranya menghasilkan Medan Declaration yang menghasilkan komitmen untuk memperluas partisipasi anggota parlemen di Asia Tenggara ke dalam organisasi SEAPAC dan adopsi terhadap SEAPAC *Regional Action Plan* sebagai kerangka kerja bersama para anggota parlemen SEAPAC. (si) foto: odjie/parle/iw.

# Sektor Kelautan dan Pertanian Harus Dapatkan Alokasi Anggaran Memadai



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo

Luasan potensi kelautan Indonesia sangat besar, peningkatan daya saing harus menjadi skala prioritas. Pemerintah mendatang diharapkan memberikan komitmen terhadap sektor kelautan akan dikelola sebagai negara maritim.

“Pemerintahan mendatang, tentunya sektor kelautan dan pertanian harus mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sehingga swasembada

dan kedaulatan pangan akan tercapai serta target eksplorasi dan eksploitasi dari sektor kelautan akan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, disela Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Selasa (26/8), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Komisi IV DPR RI menerima usulan Pagu RKA K/L Tahun 2015 Kementerian Keuangan sebesar Rp.6,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1,9 triliun. Firman Subagyo mengatakan pembahasan anggaran di saat pemerintahan transisi ini belum mendapatkan gambaran secara konkret terhadap masalah rancangan anggaran tahun 2015. Karena ada konsekuensi yang nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah baru.

Dia melihat anggaran untuk sektor kelautan ada kenaikan sebesar 11,15% dari anggaran tahun 2014 yang hanya Rp.5,7 triliun. “Ini patut kita apresiasi

namun itu semua masih jauh dari harapan, karena kami berharap untuk mendukung swasembada pangan nasional salah satunya adalah potensi kelautan bisa dieksplorasi dan dieksploitasi, sehingga salah satu target untuk meningkatkan budi daya ikan dan mengatasi *illegal fishing*,” katanya.

Menurut catatannya, kerugian akibat *illegal fishing* begitu besar namun sampai hari ini kita belum mampu karena tidak mencukupinya anggaran yang memadai dan sarana prasarana juga belum mendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam Raker tersebut Menteri Kelautan Syarif Cicip Sutardjo menjelaskan suatu negara disebut sebagai negara maritim harus bisa memberikan kontribusi 35% kepada Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan negara. Sektor kelautan pada saat ini hanya mampu menyumbangkan belasan persen PDB, sehingga belum bisa



mengklaim Indonesia sebagai negara maritim. “Bahwa kita negara kepulauan terbesar iya, tetapi kita belum bisa secara maksimal mengelola sumber daya laut yang ada,” paparnya.

Menurutnya, yang telah dilakukan pemerintah seperti percepatan industrialisasi adalah proses untuk menuju negara maritim. Negara maju, katanya, petani dan nelayan tidak hanya bekerja sebagai petani dan nelayan, mereka sudah bekerja menuju ke pro-

sesing dan industri dari hasil pertanian dan perikanan. “Petani dan nelayan dibawah 5% tetapi industri hasil pertanian dan perikanan yang akan menjadikan negara itu kuat,” katanya.

Dia menambahkan, dengan adanya nilai tambah dan teknologi serta inovasi didukung SDM yang baik, seiring dengan itu baru dapat melakukan sebagai negara maritim. “Indonesia masih jauh dari kategori maritim tersebut sehingga ke depan sektor kelautan

dikelola tidak hanya ikan,” tegasnya.

Selain ikan, pengelolaan laut ada 9 sektor antara lain wisata, perhubungan laut, ESDM, lingkungan, energi terbarukan dari ombak, biofarma dan lain sebagainya. Indonesia harus melakukan peningkatan industrialisasi hasil pertanian dan perikanan. “Selain itu, untuk menuju negara maritim diperlukan payung hukum yang kuat, yaitu dibutuhkan UU tentang Kelautan,” imbuhnya. (as) foto:ray/parle

## Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan

Tim Pengawas kasus Bank Century DPR meminta agar Tim Pendukung Pengembalian Aset Bank Century menyerahkan daftar potensi aset baik *cash* maupun *non cash* Bank Century yang masih memungkinkan untuk diperoleh dan dirampas Pemerintah Indonesia. Daftar tersebut diharapkan dapat diserahkan kepada DPR paling lambat minggu kedua bulan September yang akan datang.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di Jakarta, Rabu (27/8). Hadir dari Pemerintah Menkumham Amir Syamsudin, Jaksa Agung Basrif Arief, dan wakil dari Mensesneg serta wakil Kementerian Keuangan.

Daftar potensi aset itu kata Sohibul diperlukan Timwas DPR sebagai laporan kinerja sebelum mengakhiri tugasnya pada akhir September mendatang bersamaan dengan berakhirnya DPR periode 2009-2014. “Karena Timwas dulu dibentuk lewat Rapat Paripurna, maka juga akan melaporkan kinerja



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman

nya dalam Rapat Paripurna,” jelasnya.

Menjawab pers sesuai raker tersebut, Sohibul Iman mengatakan, dari laporan Pemerintah baik di Hongkong atau Jersey kurang lebih asetnya ada 5,9 juta US dolar. Meski sudah ada keputusan di negara yang bersangkutan, tetapi pihak tergugat Hesham Al Waraq dkk itu sedang mengajukan

banding maka kasus itu belum selesai.

Sedangkan aset di Eropa, mengutip penjelasan Menkumham bahwa sedang usahakan pengembalian aset sekitar 250 juta US dolar. Tetapi menurut Sohibul, yang mungkin diperkarakan ada sekitar 165 juta US dolar dan sedang diusahakan oleh pemerintah.

Sementara yang di dalam negeri ada yang potensial dan menjadi perdebatan adalah Mal Serpong, konon takirannya sekitar 600 miliar dan DPR berharap segera dieksekusi. Namun sekarang, menurut Sohibul masih dalam proses pengadilan, kalau selesai dan menang maka menjadi milik kita.

Karena itu lanjutnya, Timwas minta Pemerintah untuk membuat *list* aset-aset yang sedang diburu statusnya seperti apa sehingga bisa dilihat mana yang sudah positif dan mana yang masih potensial serta mana yang tidak. “Hingga kini kita belum dapat angka pastinya,” kata Sohibul menambahkan. (mp) foto: iwan armanias/parle.

## DPR Periode 2014-2019 Diharap Lebih Baik dan Bersih

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo prihatin dengan merosotnya tingkat kepercayaan rakyat pada DPR akibat berbagai pelanggaran etika, ketidakdisiplinan, kinerja yang buruk,

terlebih kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Oleh sebab itu, Siswono berharap lima tahun ke depan khususnya anggota DPR periode 2014-2019 mesti

lebih baik. Tidak saja tidak melakukan korupsi, tetapi juga meningkatkan produktifitas dalam bidang legislasi.

Hal itu disampaikan Siswono saat menjadi pembicara pada diskusi Forum

Legislasi bertajuk ‘Memberantas Korupsi Melalui Legislasi’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8). Selain Siswono Yudhohusodo, hadir pula Direktur Monitoring dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri sebagai pembicara.

“Kita berharap kinerja DPR periode 2014-2019 akan lebih baik dan bersih dari korupsi dibanding DPR periode sekarang. Tapi, waktu yang akan menentukan,” kata Siswono.

Siswono yang juga anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, partai memiliki peran yang cukup besar dalam menempatkan kader di parlemen. Menurutnya, partai mesti menyingkir kader-kader yang memiliki integritas tinggi sebelum bertarung dalam Pemilu Legislatif.

“Boleh jadi kader partai terpilih dan melenggang ke senayan. Namun, partai bisa menjadi bulan-bulanan publik ketika kader partai di parlemen melakukan korupsi,” katanya.

Selain itu, masyarakat memiliki peran dalam melakukan pemilihan anggota legislatif. Publik perlu menelaah jejak rekam calon sebelum menentukan pilihan. “Pada tingkat kedua, ada di rakyat dalam memilih putra terbaik. Kalau hasilnya tidak maksimal jangan salahkan partai. Jadi kontribusi kesalahan bisa di partai dan masyarakat,” ujarnya.



Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo

Politisi Partai Golkar itu lebih jauh mengatakan, di kebanyakan negara maju, tingkat kesadaran menjaga kehormatan lembaga amatlah tinggi. Misalnya, jika terdapat pejabat negara melakukan kesalahan, maka dengan sendirinya mereka mengundurkan diri. Bahkan, kata Siswono, terdapat pejabat negara di Korea menghukum diri sendiri dengan melakukan bunuh diri. “Kalau di negara yang peradabannya maju, sudah sampai menghukum diri sendiri,” kata Siswono.

Dalam kesempatan itu Siswono mengatakan, Parlemen Indonesia sudah tergabung dalam Southeast Asian Parliamentarian Against Corruption (SEAPAC) maupun Global Organization of Parliamentarian Against Corruption (GOPAC). Bahkan dalam waktu dekat, Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Cor-

ruption (SEAPAC), Marzuki Alie dan Ketua Gugus Tugas Nasional Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung Wibowo, mengundang parlemen di kawasan Asia Tenggara, terlebih yang memiliki gugus tugas GOPAC di parlemennya untuk hadir di SEAPAC Board Meeting yang akan membicarakan program-program penguatan gerakan anti korupsi di parlemen kawasan Asia Tenggara.

Di tempat yang sama, Direktur Monitoring dan Advokasi PSHK, Ronald Rofiandri, mengatakan komitmen parlemen dalam pemberantasan korupsi perlu diperdalam. Misalnya, jika merujuk pada UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hasil revisi, mundur dari UU MD3 yang lama. Pasalnya, penggunaan keuangan setidaknya dapat dilakukan audit oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). “Tapi melalui UU MD3 hasil revisi keberadaan BAKN dihapus. Tindakan regulasi seperti ini akan menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ronald berpandangan terhadap Anggota Dewan Periode 2014-2019 perlu diketahui sejauh mana pengalaman kerja dan keberpihakan terhadap isu publik. Pasalnya dengan mengetahui jejak rekam anggota dewan, dapat mendorong DPR menjadi lebih produktif. “Serta dapat menopang agenda pemberantasan korupsi di parlemen,” pungkasnya. (nt/sc)/foto:andri/parle/iw.

## Membangun Kontrol Lewat Blogger



Wakil Ketua DPR Pramono Anung didamping pejabat Setjen DPR RI saat pertemuan dengan para netizen

DPR kembali membangun komunikasi sosial lewat komunitas *blogger* dan netizen (*internet citizen*) untuk menjangkau masukan, pengaduan, bahkan kritik untuk lembaga dan para anggota DPR RI. Ini penting agar DPR semakin dekat dengan masyarakat.

Acara bertajuk “Kopi Darat Blogger dan Netizen #Kenal DPR” dihadiri para *blogger* dan netizen dengan pembicara Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo, Rabu (27/8). Hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Chusnul Mar’iyah (UI), dan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko.

Menurut Pramono, dengan membuka kanal komunikasi dengan para *blogger* dan netizen, DPR akan semakin modern. Akses DPR semakin terbuka dan mudah untuk di-

ketahui masyarakat. Dengan begitu, para anggota DPR juga bisa lebih dekat dengan para konstituennya. “DPR harus punya sistem komunikasi yang lebih baik untuk mengimbangi pemberitaan negatif media publik,” tutur Pramono di hadapan para  *blogger*.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga memberi banyak penjelasan seputar kinerja dan capaian DPR RI. Setelah menerima penjelasan tersebut, banyak  *blogger* yang mengaku tidak cukup mendapat pengetahuan tentang DPR. Baru kali ini mereka mendapat informasi komprehensif soal lembaga

DPR. Untuk itu, lanjut Pramono, anggaran komunikasi publik untuk DPR agar diutamakan. Ini demi mendekatkan DPR dengan masyarakat.

“Karena parlemen yang modern perlu membuka diri, maka salah satu hal yang perlu kami lakukan adalah memberikan akses pada para blogger dan netizen untuk mengetahui semua aktifitas yang ada di DPR ini. Dan itu memudahkan akan membantu wajah DPR yang lebih baik di kemudian hari,” harap Pramono. (mh)/foto:andri/parle/iw.

## Pamdal DPR Gelar Apel Serah Terima Jabatan

Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal) Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan apel bersama dalam rangka serah terima jabatan Kepala Bagian Pamdal. Semula, kursi jabatan Kabag Pamdal diduduki oleh Dwi Marijanto, digantikan oleh Tamamudin.

Dalam apel bersama seluruh personil Pamdal, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum Mardian Umar, selaku biro yang membawahi Bagian Pamdal. Apel berlangsung dengan khidmat, di lapangan Panggung Demokrasi, Rabu (27/08) pagi.

Mardian, dalam amanatnya menyatakan bahwa seluruh satuan Pamdal harus fokus dan siap dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, sebentar lagi akan menghadapi DPR periode baru, yaitu periode 2014-2019, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta sidang-sidang yang akan semakin intens dilaksanakan di seluruh gedung Kompleks Parlemen.

“Kita akan menghadapi sidang-sidang ke depan. Ada pelantikan anggota yang baru, termasuk pelantikan Presiden baru pada 20 Oktober nanti, tentu pastinya ada penekanan khusus, karena event-event kenegaraan harus kita antisipasi lebih dini, lebih detail agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami dari jajaran pengamanan dalam DPR, MPR dan DPD terus menerus menjalin kerjasama terutama dengan Kepolisian RI yang dibantu Polda Metro Jaya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Mardian.



Serah terima jabatan Kabag Pamdal Dwi Marijanto kepada Tamamudin

la berharap Pamdal dapat mendukung untuk bisa menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib. Mardian juga meminta ada partisipasi aktif dari seluruhnya, baik dari Anggota Dewan, karyawan maupun orang-orang yang beraktifitas di Kompleks Parlemen untuk membantu menciptakan rasa aman dan nyaman.

“Kita harapkan ada partisipasi dan kebutuhan yang hakiki dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini yaitu rasa aman. Seluruh orang yang berada di Kompleks Parlemen jadi saling menjaga,” imbuh Mardian.

Untuk meningkatkan kemampuan para Pamdal, Mardian menginginkan agar seluruh personil dilakukan pelatihan yang intensif. Mengingat, segala macam kondisi bisa saja terjadi di Kompleks Parlemen, sehingga siap menghadapi segala kemungkinan.

“Pelatihan itu bisa pelatihan di dalam satuan, personil kita asah dengan pelatih-pelatih dari dalam maupun dibantu oleh personil unsur kepolisian yang bertugas di DPR dan mungkin ada pelatihan-pelatihan dari luar yang pasti nanti bekerjasama juga dengan TNI atau Polri, berkaitan dengan teror bom, menghadapi unjuk rasa dan lain-lain,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kabag Pamdal yang baru, Tamamudin. Ia mengatakan, untuk meningkatkan kemampuan personil Pamdal perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, sebagai Kabag yang baru, ia berjanji akan meningkatkan kemampuan Pamdal melalui pelatihan-pelatihan.

“Kita tingkatkan kemampuan Pamdal melalui pelatihan-pelatihan. Bagaimana mereka mengevakuasi Anggota Dewan

di ruang sidang, bagaimana kalau ada kegaduhan di ruang sidang, bagaimana penanganannya nanti kita akan lakukan pelatihan-pelatihan sesuai arahan Kepala Biro Umum,” jelas Tamamudin.

Ke depannya dalam memimpin Bagian Pamdal, Tamamudin akan segera

melakukan koordinasi dengan staf, untuk membuat terobosan-terobosan baru. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pamdal.

“Program-program pengamanan lama yang sudah cukup bagus, akan kami pertahankan dan tingkatkan.

Tentu ada terobosan-terobosan yang baru nanti kita akan bahas dengan teman-teman Polri dan TNI. Pada intinya, kita melaksanakan dan memberikan pelayanan keamanan yang baik, kepada Anggota DPR/MPR/DPD dan seluruh masyarakat Sekretariat Jenderal,” ujar Tamamudin. (sf,pi) foto: andry/parle/iw.

## BK DPR Terima DPRD Jambi

Badan Kehormatan - BK DPR RI menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi yang mempertanyakan hasil revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) dinilai belum memberikan pengakuan pada eksistensi anggota legislatif di daerah. Mereka meminta agar DPR mendukung perubahan agar DPRD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah.

“Kami dapat memaklumi apa yang menjadi keberatan dari anggota DPRD Jambi, cara paling baik ya berjuang lewat asosiasi dan tidak ada kata jera dalam memperjuangkan perubahan ini. Cari lain bisa dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi,” kata anggota BK Ali Maschan Moesa dalam RDPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/14).

Anggota BK dari FPDIP M. Nurdin mengingatkan keberadaan DPRD saat ini masih dipayungi UU no.32 tahun 2004 yang menyebut keberadaan wakil rakyat di provinsi dan kabupaten ini menjadi bagian dari pemerintahan di daerah. Sedangkan peraturan dan tata tertib juga diatur lewat PP no. 16 tahun 2010.

“DPRD berdasar undang-undang memang bagian dari perpanjangan tangan pemerintah di daerah, mitra pemerintah. Kita dalam hal ini tidak menerapkan trias politika murni. Kalau mau diubah berarti harus direvisi UU 32 dulu,” ujar dia.



Anggota BK Ali Maschan Moesa dan M. Nurdin

Sebelumnya Gusrizal anggota DPRD Provinsi Jambi meminta anggota legislatif di Senayan berupaya untuk mewujudkan keseimbangan dengan menerapkan trias politika murni. Ia berharap DPR dapat mendukung lewat produk legislasi yang dihasilkan.

Sedangkan Suprianto anggota Bamus DPRD Jambi menyebut kedaulatan yang telah dipercayakan rakyat seakan-akan dibonsai dengan peraturan pemerintah. “Kita itu harus tunduk pada aturan Kemendagri padahal DPR dan DPRD itu sama-sama memegang kedaulatan rakyat. Sulit bergerak, kata orang kita ini banci,” tandas dia. (iky) foto: andry/parle/iw.

## Komisi V DPR Minta Kemenpera Inventarisir Rusunawa dan Rusunami Kosong

Komisi V DPR meminta Kementerian Perumahan Rakyat melakukan inventarisasi Rusunawa dan Rusunami yang belum ditempati di berbagai daerah.

Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR mengadakan Raker dengan Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Teguh Juwarno, di Gedung Nusantara, Selasa, (26/8).

“Kita meminta Rusunawa dan Ru-

sunami yang masih belum ditempati diinventarisir segera karena banyak alasan belum ditempati karena listrik dan air belum masuk,” papar Anggota DPR Rendy Lamadjido dari Fraksi PDIP.

Selain itu, lanjutnya, saat mengunjungi berbagai daerah ada beberapa Rusunawa yang belum diserahkan asetnya padahal masih tersisa dua bulan batas akhirnya. “Kita juga meminta didata berapa Rusunawa dan Rusunami yang belum,” tandasnya.



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido

Dia menambahkan, masih belum signifikan pemerintah mengakhir



*deadlock* perumahan padahal kuncinya adalah di regulasi perbankan. “Harapan kami perlu ada regulasi tentang agraria dan perbankan karena jika tidak dilakukan maka sampai kapanpun masyarakat kecil tidak akan memiliki rumah sampai kapanpun,” jelasnya.

Sementara Bachrum Daido (F-PD) mempertanyakan peraturan Kemenera terkait fasilitas pembiayaan perumahan dimana tidak diberikan sampai 21 Maret 2015 dengan alasan, harga tanah mahal di kota besar.

“Apakah kebijakan ini hanya berlaku di kota besar dan tidak berlaku di kota lainnya, padahal REI memungkinkan dapat diberikannya peluang rakyat untuk mendapat subsidi dari rumah tapak,” ujarnya. (si) foto:iwan armanias/parle.

## DPR Sahkan Keanggotaan Banggar dan Pansus Perubahan Tatib

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Selasa (26/8) menetapkan keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) tahun sidang 2014 dan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Tata Tertib DPR-RI.

Keanggotaan Banggar DPR berjumlah 85 orang anggota sedangkan Pansus Perubahan Tata tertib berjumlah 30 orang anggota. Rinciannya, anggota Banggar dari F-PD berjumlah 22 orang, F-PG 16 orang, F-PDI Perjuangan 14 orang, F-PKS 9 orang, F-PAN 7 orang, F-PP 6 orang, dan F-KB serta F Gerindra masing-masing 4 orang dan Fraksi Hanura satu 3 orang.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

Sedangkan keanggotaan Pansus Perubahan Tata tertib terdiri F-PD 8 orang, F-PG, 6 orang, F-PDI Perjuangan 5 orang, F-PKS 3 orang, F-PAN, F-PP dan F-PKB masing-masing 2 anggota dan Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura masing-masing satu orang anggota.

Nama-nama yang masuk dalam Banggar diantaranya Djoko Udjiyanto (F-PD), Yasonna Laoly dari F-PDI Perjuangan, Ahmadi Noor Supit dari F-PG, dan Tamsil Linrung dari F-PKS. (mp) / foto:iwan armanias/parle.

## DPR Dukung Kemenpora Selesaikan Masalah Stadion Lebak Bulus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merobohkan Stadion Lebak Bulus, di Jakarta Selatan untuk pembangunan depo MRT di DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Pemprov akan membangun stadion bertaraf internasional di lahan Taman Bersih, Manusia dan Berwibawa (Taman BMW). Namun, pembangunan ini terhambat karena adanya masalah sertifikasi tanah. Badan Pertanahan Nasional belum bisa mengeluarkan sertifikat tanah lantaran masih terdapat kasus sengketa di lahan seluas 66,6 hektar itu.

Akibat dari belum jelasnya status stadion BMW pengganti stadion Lebak Bulus, Kementerian Pemuda dan Olahraga belum bisa memberikan rekomendasi kepada Pemprov untuk memindahkan stadion. Menpora Roy Suryo mengaku masih menunggu

kepastian hukum Taman BMW dari KPK. Mengingat, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto pernah melaporkan perihal permasalahan di lahan Taman BMW kepada KPK.

Menanggapi permasalahan ini, anggota Komisi X DPR Muslim mengaku mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenpora. Pasalnya, Muslim juga khawatir, jika dipaksakan untuk segera memindahkan stadion, akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kita akan dukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kemenpora. Ini sudah ada mekanisme dan aturan. Tidak hanya sebatas membongkar stadion Lebak Bulus saja, tapi juga harus jelas penggantinya. Kalau Stadion Lebak Bulus dibongkar, tapi tidak



Anggota Komisi X DPR Muslim

ada penggantinya, mau dimana lagi sarana prasarana olahraga yang ada di Jakarta selain Gelora Bung Karno,” kata Muslim dengan nada bertanya, saat ditemui di Ruang Rapat Komisi X, Senin (25/08) sore.

Politisi Demokrat ini menegaskan, jika Stadion Lebak Bulus jadi dibong-

kar, stadion penggantinya tetap harus berlokasi di Jakarta,. Ia berharap, segera ada kejelasan terhadap nasib stadion ini, pasalnya menyangkut kepentingan masyarakat. Namun, harus tetap mengikuti aturan yang ada.

“Kita tidak ingin, jika Lebak Bulus sudah dibongkar, tapi penggantinya masih bermasalah, dan berpengaruh terhadap prestasi olahraga kita. Kita dukung Kemenpora untuk berlaku sesuai aturan. Pemprov DKI juga harus siap dan betul-betul serius mencari lahan pengganti stadion Lebak Bulus,”

tambah Politisi asal Dapil Aceh ini.

Ia juga mengingatkan, jika memang masih ada permasalahan dengan pihak lain, harus segera diselesaikan. Pemprov harus memastikan lahan tidak dalam kondisi sengketa, sehingga tidak bermasalah nantinya.

“Jika memang ada permasalahan dengan BPN, ataupun pihak ke 3, ya segera selesaikan. Kemenpora juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pemprov, namun masih ada persoalan. Langkah Kemenpora untuk

berhati-hati juga sangat bagus, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Harus ada *win-win solution*,” imbuh Muslim.

Menpora Roy Suryo mengaku memang belum bisa memberikan rekomendasi pemindahan stadion jika belum ada kejelasan mengenai status Taman BMW. Ia tidak ingin kejadian P3SON Hambalang terjadi lagi pada pemindahan stadion ini. (sf)/foto: *ivan armanias/parle/iw*.

## RRI dan TVRI Belum Mampu Berikan Manfaat Maksimal Bagi Masyarakat

Siaran radio dan televisi milik negara (RRI maupun TVRI) yang ada sekarang ini dirasakan belum mampu menyelenggarakan siaran baik secara nasional maupun lokal yang mampu memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Max Sopacua, ketika menyampaikan pendapat Fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Komisi I DPR tentang RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) menjadi RUU DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (26/8) siang.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Max lebih lanjut mengatakan, pengelolaan radio dan televisi milik negara ini belum mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan. Selain itu juga belum mampu dikelola secara mandiri dan profesional menghadapi tingkat persaingan yang ketat diantara media radio dan pertelevisian serta belum memaksimalkan penggunaan teknologi yang semakin berkembang.

“Jika hal ini tidak mampu diantisipasi atau dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik, maka kelangsungan hidup radio dan televisi milik negara ini, akan ditinggalkan masyarakat. Akhirnya bahkan secara pelan-pelan akan mati suri,” tegas Max Sopacua.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid menambahkan, terkait dengan upaya kemandirian bangsa yang berdaulat dalam menyelenggarakan penyiaran publik, maka perlunya mengkaji dan mendalami kembali RUU Radio Televisi Republik Indonesia, agar produk undang-undang yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa.

Menurutnya, urgensi penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia bukan hanya untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyiaran publik. Melainkan juga untuk menjaga integritas nasional dan kemajemukan



Anggota F-PD Max Sopacua menyerahkan pandangan fraksi RUU RTRI kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung

masyarakat, membuka ruang publik untuk mendapatkan informasi yang benar, netral dan berorientasi kepada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi massa.

Lain halnya dengan Fraksi Partai Amanat nasional (PAN) yang disampaikan juru bicaranya Chandra Tirta Wijaya, bahwa selama ini masih terjadi berbagai persoalan di tubuh kedua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) itu terutama TVRI.

Berbagai persoalan itu antara lain terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan organisasi, anggaran, program siaran, pemancar, isi siaran dan lain-lain.

“Perkembangan teknologi dalam dunia siaran dimana batasan antara siaran yang berbasis audio dan video semakin tidak jelas, sehingga penggabungan kedua LPP ini merupakan sebuah keniscayaan. Hal yang sama telah dilakukan di banyak negara yang jauh lebih maju dalam dunia penyiaran,” pungkas Chandra. (Spy)/foto: *andri/parle/iw*.

# RUU Panas Bumi Disetujui DPR RI

Pariwisata DPR RI akhirnya menyetujui RUU Panas Bumi sebagai Undang-Undang. “Kita ketahui bahwa Kebutuhan Indonesia terhadap energi terus meningkat namun seiring pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi energi suplai,” ujar Ketua Pansus RUU Panas Bumi Nazarudin Kiemas saat membacakan pandangan Pansus terhadap RUU Panas Bumi di Gedung Nusantara II, Selasa, (26/8).

Menurut Kiemas, Kebutuhan energi di Indonesia masih tergantung energi fosil. Padahal kita ketahui Indonesia dilalui jalur api mulai dari Pulau Jawa, Sumatera dan Maluku.

Potensi energi panas bumi sangat berlimpah bahkan mencapai 229 titik lokasi yang tersebar di Indonesia. 207 MW potensi panas bumi dunia pengembangan panas bumi baru 4.6 persen baru potensi.

Dia menambahkan, RUU Panas Bumi ini akan menggantikan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi. “Dengan disahkannya UU maka Kebijakan Energi Nasional menegaskan pentingnya peran panas bumi dimana kontribusinya sesuai bauran energi mix yang harus mencapai 23 persen dalam tahun 2025,” tambahnya.

Dia mengatakan, pasal dan isi terkait RUU Panas Bumi meliputi beberapa hal krusial diantaranya Perijinan, insentif dan pengelolaan lahan. “Pemda berhak mendapatkan bo-



Ketua Pansus RUU Panas Bumi Nazarudin Kiemas menyerahkan Laporan Pansus kepada Menteri ESDM

nus produksi dalam pemanfaatan tidak langsung terhadap panas bumi, hal ini menjadi prioritas utama dalam pengelolaan panas bumi,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemanfaatan kawasan hutan untuk panas bumi harus dapat menjaga hutan agar tetap lestari.

(si)/foto:odjie/parle/iw.

# RUU SPK Disetujui Jadi Undang-undang



Ketua Pansus RUU SPK Ferrari Roemawi menyerahkan Laporan Pansus kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung

Rancangan Undang-undang (RUU) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) akhirnya disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU. RUU yang sangat strategis ini bisa menjadi senjata bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan di pasar global.

Ketua Pansus RUU SPK Ferrari Roemawi (F-PD) dalam pengantarnya di Rapat Paripurna, Selasa (26/8), menyampaikan, DPR banyak melakukan perubahan atas naskah RUU SPK yang diusulkan pemerintah ini. Kehadiran RUU ini sangat ditunggu oleh para pelaku usaha, baik eksportir maupun

importir, terutama pelaku usaha kecil menengah di Tanah Air.

RUU ini akan menjadi proteksi utama dari serbuan produk-produk impor yang bebas masuk ke pasar nasional pada 2015. Produk-produk impor yang tak bermutu dan tidak memenuhi standar nasional dilarang masuk. Bahkan, RUU ini sangat strategis untuk membimbing pelaku usaha kecil menengah di Indonesia agar semua produknya memenuhi standar dan punya daya saing di pasar global.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo dan dihadiri pihak pemerintah. Sementara Menristek Gusti Muhammad Hatta sebagai wakil pemerintah, menyampaikan, selama ini banyak peraturan mengenai standardisasi yang bersifat sektoral dan tidak memadai untuk kepentingan nasional. Dengan RUU SPK yang disahkan ini, semua peraturan terintegrasi dan melindungi semua pelaku, baik konsumen maupun

produsen di dalam negeri.

Masih menurut Menristek, Indonesia adalah satu-satunya negara di kelompok G20 yang belum memiliki UU yang mengatur standardisasi. De-

ngan disahkannya RUU SPK ini, tentu menjadi momentum berharga untuk memulai persaingan di pasar global. Selain menjadi payung hukum, RUU ini juga akan menstimulasi pelaku UKM untuk meningkatkan mutu produknya

dan berani bersaing di era pasar bebas ini. Untuk itu, butuh dukungan IPTEK agar produk UKM kian berkualitas. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Komisi VIII dan Menag Sepakat Batalkan DAM

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama untuk membatalkan DAM yang dibayar dengan menggunakan dana optimalisasi haji, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435H/2014M ini. Pasalnya pada rapat sebelumnya DPR meminta Kementerian Agama mengkaji ulang rencana pembayaran DAM secara kolektif yang diambil dari dana optimalisasi haji. Namun pada bulan Januari 2014 pemerintah telah menandatangani MOU dengan IDB (Islamic Development Bank).

“Dulu kami menyetujui DAM karena berasal dari BPIH tapi ternyata menggunakan dana optimalisasi dan pemerintah sudah menandatangani kerjasama dengan IDB. Belakangan muncul pendapat yang menyatakan hal tersebut diharamkan. Selain itu yang juga menjadi pertanyaan kami apakah DAM yang sudah disembelih di tanah suci dapat dikirim kembali ke tanah air. Saat itu dikatakan bisa, tapi pada kenyataannya sampai sekarang hal tersebut tidak pernah terjadi,” papar anggota Komisi VIII Aziz Suseno.

Dalam rapat kerjanya dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengamini hal terse-



Anggota Komisi VIII DPR Aziz Suseno

but. Keduanya sepakat untuk membatalkan pelaksanaan kebijakan pembayaran DAM (denda) Haji Tamattu' atau Qiran secara kolektif melalui dana optimalisasi jemaah haji.

“MoU yang telah ditandatangani pemerintah (Menteri Agama) dengan IDB tentang Program Adahi belum bersifat mengikat, karena belum ditindaklanjuti dengan kontrak kerja mengenai pelaksanaan program Adahi,” jelas Lukman.

Dijelaskannya bahwa pembayaran DAM seorang jemaah haji berasal dari

dana optimalisasi haji yang berada dalam rekening menteri agama. Hal ini memungkinkan dana calon jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu pemberangkatan itu digunakan oleh calon jemaah haji yang akan berangkat tanpa adanya ijin. Hal tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Tidak hanya itu, pembatalan tersebut juga didasarkan atas surat dari Komisi Fatwa Majelis ulama Indonesia No: B-330/MUI/VIII/2014 mengenai pembayaran DAM secara kolektif. Dimana salah satunya menerangkan bahwa jika sumber keuangan pembayaran DAM dari dana non halal, harta ribawi, atau syubhat seperti dana milik orang lain atau dana bersama yang tidak ada ijin dari pemiliknya digunakan, dana dari bunga atau dana yang belum jelas asal usulnya, maka hal tersebut tidak diperkenankan.

“Dengan mendengarkan masukan dari DPR dan MUI, maka kami sepakat untuk membatalkan pembayaran DAM secara kolektif dengan menggunakan dana optimalisasi haji,” ucapnya mengakhiri. (Ayu)

## DPR Serahkan DIM Revisi UU LPSK

Seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi RUU Perubahan atas UU no.13/2006 dalam rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menkumham. Disepakati pula pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengaktifkan pembahasan produk legislasi yang telah melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini.

“Semangat pembahasan mengarah pada pembentukan panja yang segera mulai bekerja dalam minggu ini,” kata pimpinan sidang Al Muzammil Yusuf dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/14).

la menambahkan dari hasil rekapitulasi telah dihimpun 154 DIM dengan rincian 83 DIM tetap, 4 DIM Tetap dengan catatan, 3 DIM yang bersifat redaksional, 38 yang bersifat substansi, 11 meminta penjelasan dan 11 mengusulkan substansi baru. Seluruh DIM fraksi secara simbolis diserahkan anggota Komisi III dari FPHanura Syarifudin Sudding kepada Menkumham.

Al Muzammil yang juga Wakil Ketua Komisi dalam kesempatan itu meminta persetujuan pemerintah untuk memulai rapat konsinyering panja pada tanggal 28-30 Agustus yang akan datang. Menkumham yang juga didampingi oleh jajar-



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf

an komisioner LPSK menyetujui permintaan tersebut.

Sementara itu Menkumham Amir Syamsudin dalam sambutannya mengatakan revisi UU no.13/2006 tentang LPSK diperlukan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada saat ini. Penyesuaian itu diantaranya, perluasan hak yang diberikan kepada saksi dan korban yaitu hak untuk merahasiakan identitasnya, mendapat tempat kediaman sementara dan pendampingan dalam proses peradilan.

“RUU juga memperluas subjek yang mendapat pendampingan selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang meliputi juga pelapor, *whistle-blower* dan *justice colaburator*,” demikian Amir. (iky) /andri/parle/iw.

## DPR Dukung Kenaikan Elpiji Secara Bertahap

PT Pertamina (Persero) mengumumkan akan menaikkan gas elpiji ukuran 12 kilogram pada penghujung 2014. Besaran kenaikan diperkirakan di kisaran angka Rp 1000-Rp 1500. Langkah ini dilakukan agar Pertamina tidak terus merugi hingga Rp 5 miliar per tahunnya.

Anggota Komisi VII Agus Sulistiyono mengaku mendukung langkah yang akan dilakukan BUMN bidang energi terbesar di Indonesia ini. Padahal, rencana menaikkan harga elpiji sudah sejak lama, namun terkendala kebijakan di pemerintah.

“Penjualan elpiji 12 kg itu selalu merugi. Setidaknya setahun rugi 6 miliar. Maunya Pertamina, ini supaya bisa dinaikan (harganya), tetapi waktu itu perencanaan menaikkan sudah beberapa kali gak jadi-jadi. Rencananya sebelum Oktober 2014 Pertamina sudah menaikkan harga elpiji, dalam rangka menutupi Pertamina yang selalu rugi,” kata Agus, saat dihubungi



Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistiyono

via telepon oleh Parle, Selasa (26/08).

Politisi PKB ini menilai, karena elpiji 12 kg tidak termasuk ke dalam produk energi yang tidak disubsidi Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak mau membayar kerugian tersebut. Ironisnya, dengan kerugian yang dialami Pertamina, berarti turut mengurangi pemasukan negara.

“Pertamina selalu membayar kerugian, pemerintah juga tidak mau membayar kerugian itu yang pada akhirnya juga kan pengurangi pemasukan negara,” imbuh Politisi asal Dapil Yogyakarta ini.

Walaupun Pertamina belum bisa menaikkan harga elpiji sesuai dengan harga keekonomian, kata Agus, namun setidaknya dengan menaikkan harga secara bertahap, Pertamina dapat mengurangi kerugian. Diharapkan, kenaikan ini tidak memberatkan konsumen. Apalagi, konsumen elpiji 12 kg termasuk dalam kategori mampu.

“Nampaknya pemerintah akan menyesuaikan harga supaya menutupi kerugian, tidak Rp 5 miliar pertahunnya. Saya pikir, pengguna elpiji 12 kg termasuk dalam golongan mampu, jadi masih dalam batas kewajaran sendainya harganya dinaikkan,” imbuh Agus. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Rapat Komisi II DPR Dengan Kemendagri dan BNPP Hasilkan 7 Kesimpulan

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakan Naja dengan Kemendagri dan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang berlangsung pada Senin (25/8) hasilkan 7

(tujuh) kesimpulan.

Kesimpulan yang pertama, Komisi II DPR dapat menerima laporan realisasi penyerapan anggaran Kementerian

Dalam Negeri Tahun 2013 sebesar 88,83 persen atau Rp 14.400.660.453.443,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp 16.212.353.827.000,-.

Kedua, Komisi II DPR tidak menyetujui penyesuaian pagu Kemendagri Tahun 2015 dengan adanya pengurangan sebesar Rp 7.524 triliun lebih dari pagu indikatif Kemendagri tahun 2015 yang sebesar Rp 14.797 triliun, terutama pada pengurangan pagu yang bersumber dari kegiatan PNPMP yang dialihkan menjadi Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketiga, terhadap pagu anggaran Kemendagri Tahun 2015, Komisi II DPR akan melanjutkan pembahasannya secara lebih rinci pada RDP yang akan datang.

Keempat, Komisi II DPR dapat menerima laporan realisasi penyerapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2013 sebesar 75,37 persen atau sekitar Rp 206.612.464.304,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp 274.124.430.000,-, serta meminta kepada BNPP agar tingkat penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan pada APBN 2014 yang sedang berjalan.

Kelima, terhadap pagu anggaran BNPP tahun 2015 sebesar Rp 210.247.000.000,- Komisi II DPR akan membahasnya secara lebih rinci pada RDP yang akan datang.

Keenam, Komisi II DPR meminta Kemendagri dan BNPP untuk segera menyelesaikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK terkait hasil pemeriksaan Laporan



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja

Keuangan Tahun 2013, serta lebih meningkatkan tata pengelolaan keuangannya agar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan Keuangan Tahun 2013 dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun yang akan datang.

Ketujuh, Komisi II DPR akan segera mengagendakan Rapat Konsultasi dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kantor Set-Wapres dan TNP2K untuk membahas pelaksanaan anggaran sebagaimana yang dimatkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan pembahasan terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri).  
(nt) foto: rizka/parle/iw.

## Teguh Juwarno Gantikan Alm. Laurens Bahang Dama



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyerahkan palu kepemimpinan Ketua Komisi V kepada Teguh Juwarno

Teguh Juwarno menggantikan Alm. Laurens Bahang Dama sebagai Ketua Komisi V DPR dari Partai PAN. Pergantian pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung Nusantara, Senin, (25/8).

Pada kesempatan itu, Pramono Anung mengatakan, bahwa tugas DPR yang tidak dapat diselesaikan pada akhir

masa jabatannya tidak dapat di *carry over* termasuk produk legislasi kepada anggota DPR baru nanti. "Termasuk perundang-undangan harus diselesaikan pada DPR periode ini. Jika tidak selesai tidak bisa di *carry over* periode mendatang," ujarnya.

Pramono berpesan agar Produk UU yang ada segera dituntaskan pada masa sidang ini. Selain itu, dirinya juga meminta anggota Periode 2009-2014 menjaga diri jangan sampai tergoda dan terkena kasus korupsi seperti kasus-kasus lalu. "Mengingatkan pada semua dan diri kita sendiri karena banyak yang terkena kasus pada akhir masa jabatan ini, jangan sampai nama baik yang kita jaga langsung hilang," jelasnya.

Sementara anggota DPR Mulyadi (F-PD) mengatakan, perlu dijelaskan kepada publik bahwa persoalan legislasi bukan semata-mata karena kinerja Dewan yang rendah tetapi ada juga faktor dari pemerintahnya. "Misal RUU Jalan dihentikan sepihak oleh pemerintah dan bahkan pimpinan sudah berkirip surat artinya jangan sampai kinerja DPR dianggap tidak optimal bekerja menuntaskan legislasinya," ujarnya.  
(si) foto: rizka/parle/iw.



# Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatasan BBM Kepada Masyarakat

Pemerintah diminta melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM yang menyebabkan kelangkaan BBM yang merata di Pulau Jawa. “Kelangkaan BBM juga disebabkan kurang transparannya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Anggota DPR dari Partai Golkar Satya Widha Yudha kepada parlemen, Senin, (25/8).

Menurut Satya, perlu segera sosialisasi apakah dibatasi atau tidak, karena apabila dibatasi volume BBM tentunya siapa yang cepat maka dia yang dapat BBM. “Bisa juga yang dapat tangki dirigen yang *nongkrong* itu bisa dapat duluan,” terangnya.

Dia menambahkan, jika ada pem-



Anggota Komisi VII DPR Satya Widha Yudha

batasan maka harus ada semacam kriteria atau payung hukumnya. “Yang tidak sesuai kriteria dianggap melanggar aturan, jika tidak ada Kriteria dan

payung hukum maka situasi akan *chaos* sesuai prinsip *first come dan first serve*,” tandasnya.

Dia mengatakan, melalui sosialisasi dan kriteria maka BBM dapat terjaga. Selain adanya usulan untuk membatasi subsidi BBM, lanjutnya, silahkan saja pemerintah baru mengurangi subsidi BBM namun tentunya penghematan yang ada dapat dialihkan program yang *targeted* (terukur).

“Semua Pilihan kita serahkan kepada pemerintah, jadi melalui subsidi yang *targeted* jangan sampai inflasi meningkat jika memang harus dicabut program untuk rakyat lebih terfokus dan terarah,” tutupnya. (si) foto: iwan armanias/parle.

## Penyerapan Anggaran Kemenkop UKM 35,42 Persen



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satria Wardhana

Hingga 31 Juli 2014, penyerapan anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mencapai 35,42% atau Rp474.311.000.000 miliar dari pagu APBN P 2014. Komisi VI dalam kesimpulan rapatnya memahami serapan anggaran tersebut.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Senin (25/8). Pagu anggaran Kemenkop sendiri dalam APBN P 2014 sebesar Rp1.420.448.122.000. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Erik Satria Ward-

hana, didampingi oleh Airlangga Hartarto (F-PC), Azam Azman (F-PD), dan Aria Bima (F-PDI Perjuangan).

Menkop Syarif Hasan dalam rapat tersebut menyampaikan, semua anggaran di kementeriannya yang masih diblokir sudah diupayakan segera dicairkan agar semua program di Kemenkop berjalan lancar. Pihaknya mengaku sudah menghubungi Kemenkeu untuk itu. Anggaran yang juga segera cair adalah alokasi anggaran untuk para pelaku muda di bidang UKM. Dengan begitu diharapkan sektor UKM kembali tumbuh menggeliat untuk kesejahteraan masyarakat kecil.

Sementara itu, dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR juga menerima pagu anggaran Kemenkop UKM untuk 2015 sebesar Rp1.451.210.812.000. Selanjutnya, usulan ini akan segera dibawa ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas. Komisi VI akan memperjuangkan pagu Kemenkop tersebut di Banggar. (mh) foto: iwan armanias/parle/iw.

## Dewan Minta Program Badan POM Diprioritaskan Hadapi MEA



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan memprioritaskan program-program yang akan dilakukan di tahun 2015, agar produk-produk BPOM tidak kalah saing dengan produk negara lain.

“Saya berharap, produk yang sudah ada itu diperkaya, jadi tidak sekadar bisnis saja tapi ada teroposan-terobosan baru dalam rangka MEA ini supaya kita tidak kalah bersaing”, ujar Anggota komisi IX DPR, Okky Asokawati saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM yang diwakili Deputi Obat Tradisional, T. Bahdar J. Hamid membahas Laporan Keuangan Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2015 BPOM di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/8).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Supriyatno tersebut, Okky juga memberikan apresiasi terhadap prestasi yang dicapai BPOM sepanjang 2013. Antara lain BPOM menjadi Instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85 instansi pemerintah yang di survey KPK dan BPOM meraih e-Transparency Award 2013 sebagai peringkat ke-6 dari 47 situs K/L yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama selain memberikan apresiasi, Okky juga mempertanyakan Laporan Keuangan 2013 BPOM.

“Pada laporan keuangan 2013, terdapat sisa belanja tahun 2013 yang terlambat di setor ke Kas Negara senilai Rp 194.908.580,- itu sekarang dimana posisinya. Kemudian mengenai aset tetap pengadaan tahun 2013 yang belum dimanfaatkan, aset apa saja dan apakah bisa dimanfaatkan untuk selanjutnya ini,” tanya politisi Fraksi PPP ini.

“Dalam hal, temuan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Badan POM akan menindaklanjuti yaitu berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk proses administrasi penghapusan bangunan Gedung Pertemuan Permanen dari daftar Pengguna/Kuasa Pengguna, bagaimana eksekusi dari penghapusan bangunan gedung tersebut dan untuk apa,” lanjut Okky.

Okky juga mempertanyakan mengenai kepercayaan yang diberikan dari negara-negara ASEAN kepada Badan POM. Dimana BPOM ditunjuk menjadi laboratorium rujukan ASEAN untuk bahan tambahan pangan, namun Badan POM perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai yaitu sebesar Rp 5 Miliar.

“Apa yang akan dilakukan dengan uang sejumlah tersebut dan apakah untuk rujukan laboratorium itu akan diadakan di Jakarta saja atau di daerah-daerah juga akan diadakan terkait dengan rujukan. Ini menarik, saya ingin tahu juga bagaimana sampai Badan POM sampai mendapatkan penunjukkan tersebut,” paparnya. (sc)/foto:andri/parle/iw.

## Koperasi Wanita Perlu Diperhatikan

Banyak jenis koperasi berdiri di daerah, namun banyak pula yang tutup karena tak kuasa menghadapi persoalan finansial yang membelit. Dan satu segmen koperasi yang juga kurang mendapat perhatian adalah koperasi wanita.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Azman Natawijana saat raker dengan Menteri Koperasi Syarif Hasan, Senin



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azman Azman Natawijana

(25/8), mengimbau, agar koperasi wanita terutama di Manokwari, Papua Barat, mendapat perhatian khusus. Ini ia kemukakan setelah berkunjung dan melihat langsung nasib koperasi wanita di Manokwari. Perhatian yang dibutuhkan adalah bantuan alokasi anggaran bagi koperasi wanita tersebut.

“Koperasi wanita di Manokwari belum dapat alokasi anggaran. Komisi

IV DPR juga pernah melihat langsung koperasi wanita ini dan tak bisa membantu anggarannya. Saat ini, Komisi VI DPR menghimbau Pak Menteri untuk memperhatikan anggarannya dalam penyusunan anggaran Kementerian Koperasi,” jelas Azam.

Menanggapi himbuan Azam, Men-

kop Syarif Hasan, menyatakan, koperasi wanita selama ini memang lebih baik daripada koperasi yang dikelola kaum pria. Himbuan ini akan menjadi perhatian tersendiri dan mengalokasikan anggarannya dalam penyusunan anggaran di Kementerian Koperasi. Menkop yang baru nanti, memang, harus perhatian terhadap koperasi wanita.

Diakui Menkop, dari 207 ribu koperasi yang ada di Indonesia, koperasi wanita memang minim perhatian. Ke depan dengan memberi alokasi anggaran bagi koperasi wanita, maka akan meningkat berdirinya koperasi sejenis di seluruh daerah di Indonesia. (mh)/foto:iwan armarias/parle/iw.

## DPR Tolak Realokasi Anggaran PNPM untuk Dana Desa

Komisi II DPR RI menolak adanya realokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tahun 2015 yang dilakukan oleh pemerintah untuk dana desa karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Desa.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, usai memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala BNPP, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8).

“Sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2015, presiden sudah sepakat mengalokasikan dana Rp 9,1 triliun untuk desa. Namun dalam raker dengan Kemendagri tersebut disampaikan jika dana desa itu diambil dari dana PNPM Mandiri,” kata Hakam N.

Namun ternyata secara teknis tadi dalam rapat, Kemendagri memaparkan bahwa dana desa itu diambil dari dana PNPM khusus Kemendagri, dan tentu kementerian terkait lain. “Nah ini kita masih belum ketemu. Maka tadi komisi II menolak realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dari

Kemendagri yang digunakan untuk dana desa,” jelas Politis dari FPAN ini.

Padahal, kata politikus Partai Amanat Nasional itu, pasal 72 UU Desa menyatakan alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer daerah dan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, kalau sekarang dana desa sebesar Rp 600 triliun maka dana desanya Rp 60 T.

la menambahkan, DPR akan meminta klarifikasi, verifikasi dan cek kembali tentang bagaimana pandangan pemerintah bisa seperti itu, karena menurut Hakam, anggota Pansus Desa yang duduk di Komisi II menilai tidak sesuai dengan maksud dirumuskannya pasal 72 tentang dana desa itu

Oleh karena itu, lanjut Hakam, hal ini perlu dibutuhkan komunikasi dengan pemerintah, “Kita akan segera mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah seperti Menkokesra, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kantor Set-Wapres dan TNP2K agar implementasi dari UU Desa ini bisa betul betul terlaksana dan sampai didesa sesuai dengan yang dimaksud dari ditetapkannya pasal 72 yaitu 10 persen dana transfer ke daerah itu



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dipergunakan untuk dana desa,” tegas Hakam.

Dalam kesimpulan rapatnya, Komisi II DPR tidak menyetujui penyesuaian pagu Kemendagri Tahun 2015 dengan adanya pengurangan sebesar Rp. 7.524 triliun lebih dari pagu indikatif Kemendagri tahun 2015 yang sebesar Rp. 14.797 triliun, terutama pada pengurangan pagu yang bersumber dari kegiatan PNPM-MP yang dialihkan menjadi Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (nt)

## Pemerintahan Mendatang Harus Cerdas

Jika RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di paripurna DPR RI pada Jumat (15/8) lalu, meninggalkan bom waktu, dan pemerintahan mendatang tidak cerdas membuat terobosan-terobosan, maka dalam RAPBN itu banyak jebakan yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5,5 %, maka rakyat tak akan mendapat apa-apa. Jadi, kalau RAPBN itu tidak dibongkar dengan melakukan kreasi dan terobosan ekonomi

dengan pertumbuhan sampai 7 %, maka pemerintahan itu akan bertahan hanya dua tahun,” tegas mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli dalam diskusi “Membedah RAPBN 2015” bersama politisi PDIP Hendrawan Supratikno, dan praktisi ekonomi, John Riyadi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/8/).

Rizal menyatakan, ada dua hal penting dari RAPBN tersebut, yaitu perubahan oposisi strategis dan perubahan ekonomi yang strategis.

“Selama pemerintahannya, SBY tutup mata terhadap partai koalisi yang dibiarkan korupsi dan rakyat menderita. Untuk itu, oposisi ke depan akan lebih serius dan konfrontatif, karena mereka ini menguasai 2/3 DPR RI. Kalau pemerintah tidak canggih, maka DPR akan banyak membuat masalah,” tukasnya.

Perubahan yang strategis tersebut adalah tampilnya China, Korea, dan Jepang sebagai kekuatan ekonomi dunia, dan barat sedang bermasalah. “SBY diuntungkan dengan kondisi itu,” katanya.

Namun dari RAPBN itu, Rizal Ramli menilai Presiden SBY hanya sebagai politisi. Sebab, terjadi empat defisit, defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan (selama negatif maka rupiah terus melemah), defisit pembayaran, dan defisit APBN.

“Kalau pemerintah nanti tidak hati-hati, maka ekonomi kita akan memasuki lampu merah. Sebaliknya, kalau canggih, akan masuk kembali menjadi lampu hijau,” pungkasnya. (sc/nt)/foto:andri/parle/iw.



Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno dalam acara Bedah Buku



Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Diskursus perampingan kabinet menyambut suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik aktual akhir-akhir ini. Kaum teknokrat sebaiknya mengisi pos kementerian yang menangani masalah makro. Sebaliknya, untuk kebijakan mikro diisi para politisi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Seminar Kepakaran dengan tajuk “Postur

## Kaum Teknokrat Sebaiknya Isi Kementerian Makro

Kabinet 2014” yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jumat (22/8). Kabinet yang akan dibentuk pemerintahan Jokowi-JK tetap harus mengakomodir partai politik. Kabinet ahli (zaken kabinet) juga tidak realistis dalam konteks politik masa kini Indonesia.

Burhanuddin lalu merefleksikan zaken kabinet di masa Orde Lama, yaitu Kabinet Wilopo dan Kabinet Juanda. Keduanya merupakan kabinet yang diisi kaum profesional, namun tak berumur panjang. Sebaliknya, bila kabinet diisi kaum politisi, maka akan dipenuhi dengan target kepentingan partai politik. Burhanuddin berharap, Jokowi sebagai presiden terpilih hendaknya tidak terperangkap oleh komitmennya untuk bentuk kabinet profesional.

Selain Burhanuddin, hadir pula dalam seminar tersebut Miftah Toha (pakar politik) dan Didik Supriyanto Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai pembicara. Menurut Miftah, selama ini kabinet Indonesia selalu gemuk. Bila membandingkannya dengan postur kabinet di negara-negara lain, Indonesia selalu kegemukan karena menampung aspirasi tim koalisi.

Di Jepang, kementerian hanya 18, Korsel 13, Amerika 15, dan Australia 28. Kabinet yang gemuk dengan mengakomodasi partai politik dikawatirkan akan menyandera Jokowi sebagai presiden, sehingga tidak leluasa bergerak. Sementara Didik Supriyanto mengusulkan agar kabinet diisi 20-an menteri saja. Itu sudah postur yang ideal bagi Indonesia. (mh)/foto:andri/parle/iw.

## Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen

RAPBN 2015 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen. Angka ini hanya meningkat 0,1 persen dibanding kesepakatan di APBN-P 2014. Pemerintah mengaku, pertumbuhan 5,6 persen merupakan tingkat pertumbuhan

yang paling realistis dan konservatif dengan memperhatikan berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, serta dalam menjaga stabilitas ekonomi sebagai landasan yang solid bagi terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Pemerintah perlu menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada batas-batas yang tidak menimbulkan tekanan yang mengancam stabilitas ekonomi,” jelas Menteri Keuangan Chatib Basri saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPR, pada Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kamis (21/08).

Mantan Ketua BKPM ini menjelaskan, dari faktor eksternal berdasarkan World Economic Outlook 2014, kinerja ekonomi global memang akan mengalami perbaikan, khususnya Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Namun masih terdapat risiko yang perlu diwaspadai.

“Risiko yang perlu diwaspadai yaitu terkait kinerja ekonomi Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dimana akan berpotensi menjadi kendala dalam mendorong laju pertumbuhan ekspor Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan harga komoditas internasional dan normalisasi kebijakan moneter di Amerika juga perlu diwaspadai,” imbuh Chatib.

Sementara, dari sisi internal, kebijakan menjaga stabilitas ekonomi domestik saat ini menjadi fokus dari kebijakan ekonomi makro, khususnya dalam menjaga keseimbangan eksternal Indonesia. Kondisi dimana neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir,



Suasana Sidang Paripurna DPR

yang berimbang pada pergerakan nilai tukar rupiah.

“Oleh karena itu, stance kebijakan makro Indonesia, baik fiskal maupun moneter, cenderung lebih konservatif dan berhati-hati. Stabilitas ekonomi mutlak perlu dijaga, mengingat hal tersebut memberikan landasan yang solid serta menjadi prasyarat bagi pertumbuhan yang berimbang dan berkelanjutan,” jelas Chatib. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

## Waralaba Nasional Harus Belajar Pada Waralaba Asing



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satria Wardhana

Pertumbuhan waralaba nasional melambat dibanding waralaba asing. Data menunjukkan waralaba nasional hanya tumbuh 2%, sementara asing tumbuh 9%. Kondisi ini sulit mengangkat waralaba nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saatnya untuk belajar pada asing bagaimana membangun dan mengelola waralaba.

Masalah klasik seperti permodalan, memang, masih menjadi kendala bagi waralaba nasional untuk bersaing dengan asing di negeri sendiri. “Waralaba asing didukung modal yang kuat. Waralaba asing *network*-nya mendunia. Seperti misalnya 7Eleven hampir di seluruh negara di dunia dia ada. Jadi skalanya jauh di atas skala ekonomis. Dia bisa membeli barang dengan harga yang relatif murah. Daya saingnya tinggi sekali,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI Erik Satria Wardhana.

Erik yang ditemui, Kamis (21/8), sebelum Rapat Paripurna DPR, mengkhawatirkan, bila waralaba asing terus mendominasi pasar nasional, maka produk asing akan menjamur di Indonesia. “Akhirnya, kita jadi negara pasar atau konsumen bukan negara produsen,” keluh politisi HANURA tersebut.

Untuk memproteksi waralaba nasional, sambung Erik, perlu ada kebijakan standardisasi kualitas usaha dan membuat peraturan yang ketat bagi waralaba asing di Indonesia. Pasar nasional

harus diberi proteksi khusus. Ini penting agar produksi dan pengusaha nasional punya pangsa pasar yang cukup di negeri sendiri.

Waralaba nasional juga harus banyak belajar pada waralaba asing bagaimana membangun *network* dan mendapat akses permodalan yang memadai. Dengan begitu nantinya waralaba nasional bisa ekspansi ke luar negeri. “Kemungkinan ekspansi tetap ada. Tapi, sekarang jadi tuan rumah aja dulu di negeri sendiri. Waralaba kita harus banyak belajar dari waralaba asing, sehingga bisa membangun *network* di pasar modern.

Dalam UU Perdagangan, peran mem-bina, perizinan, dan mengatur alokasi waktu operasi waralaba dipegang oleh pemerintah daerah. “Saya kira pemerintah daerah di mana pun harus punya keberpihakan. Kalau sudah punya keberpihakan, maka kita bisa merumuskan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang berpihak pada waralaba nasional,” tegas Erik. (mh)/foto:iwan armianas/parle/iw.

# Kabinet Mendatang Perlu Rampingkan Jumlah Kementerian



Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa menilai kabinet mendatang perlu menata ulang atau merampingkan Kementerian dari 34 Kementerian menjadi 19 Kementerian. Hal tersebut semata untuk melakukan penghematan keuangan negara. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan

saat bedah buku terbarunya “19 Kementerian Negara, Sebuah Pemikiran” di Gedung DPR RI, baru-baru ini.

“Dengan perampingan jumlah Kementerian tersebut belanja kementerian juga bisa dihemat, artinya akan terjadi penghematan keuangan negara yang cukup besar. Sehingga uang negara akan lebih banyak digunakan untuk belanja rakyat, bukan belanja pemerintah,” ucap politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ditambahkan Agun, perampingan susunan kelembagaan birokrasi pemerintahan perlu segera ditindaklanjuti. Kesamaan tugas dan fungsi antar beberapa lembaga birokrasi perlu segera dianalisa dan dicari jalan keluar atas dasar efisiensi, penghematan, koordinasi, integrasi baik dalam masa krisis maupun non krisis. Tidak hanya itu,

menurut Agun perubahan yang ada juga harus disesuaikan pada jumlah eselonisasi di pemerintahan daerah sesuai kebutuhan objektif pelayanan.

“Penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, oleh karenanya dibutuhkan itikad yang baik dari pemerintah pusat untuk merintis dan memulai terbentuknya Kementerian Negara sebagai lembaga profesional, dan bukan sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar kompromi politik dan balas jasa, meskipun keberadaannya tidak dapat dihindari,” jelas Agun.

Hal ini lanjut Agun, menjadi sebuah tantangan bagi presiden dan wakil presiden terpilih mendatang, untuk berani memulai penataan kembali sistem kelembagaan yang ada. (Ayu)/foto:odjie/parle/iw.

## Wakil Ketua DPR Terima Paskibraka

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Priyo Budi Santoso menerima Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/8).

“Mereka merupakan anak-anak terpilih lewat seleksi yang amat ketat, mereka telah lolos dari “lubang jarum”. Suatu kehormatan mereka dapat mengibarkan bendera pusaka pada detik-detik proklamasi di Istana,” ungkap Priyo.

Priyo menjelaskan ditengah generasi muda seusianya yang masih suka hura-hura, Paskibraka malah sebaliknya. Mereka terpilih untuk kemudian mendapat bimbingan tentang nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan pendidikan dan pembekalan yang diikuti hal tersebut menjadi sebuah modal untuk menumbuhkan bibit-bibit kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional.

Di akhir pertemuannya dengan 68 Paskibraka dari 34 Provinsi itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga berpesan agar jangan ragu-ragu jadi motor penggerak di daerahnya masing-masing. Terutama terkait dengan semakin merosotnya nilai-nilai moral, hukum, cinta tanah air, dan juga nilai-nilai Pancasila lainnya di kehidupan anak-anak muda.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Paskibraka

Bahkan lebih lanjut Priyo mengungkapkan untuk mengharuskan siswa sekolah menggelar rutinitas berupa upacara penaikan bendera di sekolahnya masing-masing, yang belakangan sudah mulai menghilang. Menurutnya, upacara penaikan bendera merah putih tidak sekedar ritual atau rutinitas semata, melainkan menjadi sebuah bentuk pembelajaran dan pelatihan serta penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. (Ayu) foto: andry/parle/iw.



# Sambut HUT DPR Ke-69 22 RUU Kembali Disahkan



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso didampingi Pimpinan MPR memotong tumpeng menyambut HUT 69 DPR RI

Menyambut kemeriahan HUT DPR RI ke-69, 22 Rancangan Undang-Undang (RUU) kembali disahkan DPR. Ini tambahan capaian positif bagi DPR jelang berakhirnya masa kerja. Dari 22 RUU itu, 11 RUU diantaranya menyangkut Prolegnas, 3 RUU Daerah Otonomi Baru (DOB), 5 RUU Perjanjian Internasional, dan 3 RUU Anggaran.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda khusus HUT DPR RI, Jumat (29/8). Selain ke-22 RUU tersebut, kemungkinan besar jumlah RUU yang segera diselesaikan akan terus bertambah hingga akhir September 2014 mendatang.

Secara lebih rinci, Priyo menyampaikan beberapa RUU yang telah disahkan menjadi UU. Di antaranya dari Prolegnas adalah UU Keinsinyuran, UU Kesehatan Jiwa, dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dari RUU Daerah Otonomi Baru ada 3 (tiga) pemekaran, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Ketiganya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara RUU Perjanjian Internasional di antaranya menyangkut UU Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan India tentang Bantuan Hukum

Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Lalu ada UU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan India. Dan ada UU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.

Di bidang anggaran, RUU yang sudah disahkan adalah UU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Selain itu, ada UU APBN 2012 dan UU APBN 2014. Semua RUU yang sudah disahkan tersebut merupakan capaian monumental ketika masa kerja tinggal menghitung hari.



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko menerima buku dari Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR

## Kado Istimewa Untuk DPR

Masih dalam rangkaian acara ulang tahun DPR ke-69, DPR meluncurkan buku berjudul *Warna-warni DPR dan Kicauan Senayan*. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, hal ini sebagai kado istimewa di hari ulang tahun DPR. Buku ini disusun oleh segenap wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI.

“Hari ini segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Setjen DPR merasa beruntung pada ulang tahun ke-69 kami mendapatkan kartu istimewa dari Press Room, dua buku karya *genuine*, atau karya teman-teman Press Room yang selama 24 jam ini konsentrasi untuk bertugas di lingkungan DPR RI. Atas nama pimpinan, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Priyo, saat memberikan sambutan peluncuran buku, di Lobby Gedung Nusantara II, Jumat (29/08).

Politisi Golkar ini menambahkan, hal ini menjadi tradisi yang baik untuk periode berikutnya, sehingga mewariskan karya yang dapat dinikmati sampai anak cucu. Menurutnya, untuk mengetahui situasi DPR dalam 5 tahun ini, bisa cukup dengan membaca buku ini.

Sementara itu, Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR RI Jaka Surya menyatakan, gagasan ini muncul karena selama ini banyak ide yang belum ditampung dan dibukukan. Gagasan ini mendapat dukungan dari Setjen DPR untuk disusun menjadi buku.

“Buku ini akan menjadi warisan yang berharga untuk siapapun. Saya kira ini buku yang pertama kali menampilkan sebuah lembaga dalam bentuk fotografi dan jurnalistik, yang dibuat oleh teman-teman wartawan yang bertugas disini, sehingga sudut pandangnya akan berbeda, terimakasih untuk semua pihak yang telah mendukung,” ujar Jaka. (mh,sf) foto: iwan armanias/parle



Suasana Upacara Bendera dalam rangka HUT DPR RI ke 69 dipimpin Inspektur Upacara Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Jumat (29/8). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menandatangani Peluncuran Buku Warna-warni DPR dan Kicauan Senayan disaksikan Sekjen dan Wasekjen DPR RI, Jumat (29/8) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Anggota DPR 2014-2019 mengikuti Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional di Lemhanas, Senin (25/8). Foto: Naefurodjie/Parle/Iw.